



# DPRD Melawi Usut Defisit APBD

**PONTIANAK** - Silang pendapat aturan main. Semuanya dilakukan antara kaum intelektual Kamus-Raya bersama antara legislatif dan eksekutif (Kaum Muda Kapuas Raya) dan Pemkab Melawi soal defisit anggaran APBD 2022 Kabupaten Melawi mengundang reaksi kalangan legislatif. Wakil Ketua DPRD Melawi, Taufik mengatakan akan membahas masalah ini bersama eksekutif.

"Secepatnya kami (DPRD) akan melakukan pembahasan bersama TAPD eksekutif. Sejauh mana simpul masalah soal defisit APBD yang tengah hangat-hangatnya ini. Saya juga sudah lakukan kontak dengan Bu Ketua Dewan. Banmus DPRD Melawi juga sudah menjadwalkan rapat bersama. Tetapi, kami akan fokus ke internal dahulu," ucap politisi dari Fraksi Golkar Melawi ini.

Menurutnya, DPRD Melawi memiliki fungsi pengawasan. Pihaknya memastikan pembahasan APBD 2022 dan 2023 selalu mengikuti

pertanyaan dengan TAPD bahwa struktur APBD Kabupaten Melawi Tahun 2022 heboh tersebut. Tim anggaran DPRD jelas akan bicara apa adanya," ujar dia.

Nah, soal anggaran pekerjaan 2022 yang tidak terbayar sampai akhir tahun atau di APBD 2022, juga akan dipertanyakan.

"Kami bingung, sebab dalam waktu dekat, kata dia, kemungkinan pada Senin (hari ini), DPRD Melawi sudah akan dapat menyimpulkan isu defisit tersebut. Untuk itu, data-data dinilai perlu dikumpulkan dan ditelaah terlebih dahulu secara menyeluruh.

"Jadi, apakah nanti akan dibuatkan pansus atau seperti apa, keputusannya tetap berada di tangan legislatif secara kolektif-kolegial. Kami pasti

pertanyaan dengan TAPD bahwa struktur APBD Kabupaten Melawi Tahun 2022 heboh tersebut. Tim anggaran DPRD jelas akan bicara apa adanya," ujar dia.

Nah, soal anggaran pekerjaan 2022 yang tidak terbayar sampai akhir tahun atau di APBD 2022, juga akan dipertanyakan.

"Kami bingung, sebab dalam waktu dekat, kata dia, kemungkinan pada Senin (hari ini), DPRD Melawi sudah akan dapat menyimpulkan isu defisit tersebut. Untuk itu, data-data dinilai perlu dikumpulkan dan ditelaah terlebih dahulu secara menyeluruh.

"Jadi, apakah nanti akan dibuatkan pansus atau seperti apa, keputusannya tetap berada di tangan legislatif secara kolektif-kolegial. Kami pasti

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa defisit APBD Melawi sebesar Rp26,4 miliar dan secara realisasi sebesar Rp6,3 miliar. Begitu keterlambatan bayar. Pro-gram pekerjaan 2022 dipakai DAU 2023," pungkas dia.

Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kabupaten Melawi menyampaikan bahwa informasi dari Kamus Rayadan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022. Kedua PMK Nomor 116/ PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal

◆ Ke Halaman 7 kolom 1

Daerah. 0,561. Oleh karena itu, batas maksimal defisit APBD Kabupaten Melawi adalah 4,4 persen dari perkiraan pendapatan daerah sejumlah Rp1.119.609.367.636 yakni sebesar Rp49.262.812.176. Sedangkan kita ketahui berdasarkan data di atas, defisit APBD Melawi hanya berjumlah sebesar Rp26.423.396.160 atau 2,36 persen," demikian siaran pers dari Pemkab Melawi.

Diberitakan sebelumnya, kaum intelektual Kamus-Raya (Kaum Muda Kapuas Raya) mengkritik soal defisit anggaran di Melawi tahun 2022 yang diduga mencapai Rp81-97 miliar, tetapi memperoleh status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI.

"Kami (Kamus Raya) meminta DPRD Kabupaten Melawi menjalankan fungsi pengawasannya dan tidak tinggal diam," kata Ketua Umum Kamus-Raya, Shirat Nur Wandani.

Menurutnya, defisit anggaran puluhan miliar yang terjadi di Melawi menandakan pengelola keuangan Kabupaten Melawi tidak sehat. Itu karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK. 07/2022 pemkab kategori rendah diatur maksimal defisit hanya 2,2 persen. Sementara, defisit Rp 81-97 miliar sudah melebihi jumlah yang dibolehkan aturan.

Di sisi lain, Pemkab Melawi diduga mengacu kepada PMK 117/PMK.07/2021 tentang batas maksimal defisit yakni 4,4 persen. Defisit ini diketahui dari Rekap Belanja Tahun anggaran 2022 yang diajukan pembayarannya tahun 2023.

"Ini yang kita pertanyakan. Kenapa terjadi defisit sebesar ini, dan ada ratusan proyek gagal bayar. Dikerjakan 2022 tetapi akan dibayarkan tahun 2023," ucap dia. (den)



Wakil Ketua DPRD Melawi, Taufik